

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2013**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Rencana Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang tahun 2013 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang Tahun 2011 – 2015. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang juga sebagai bahan untuk penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2013.

Rencana Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang tahun 2013 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang merupakan penjabaran dari Renstra SKPD, Program dan Kegiatan yang ada di Renja SKPD harus tercantum dalam Renstra SKPD yang selanjutnya menjadi dasar/pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang Tahun 2013.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang dimulai dengan usulan kegiatan yang diajukan oleh masing-masing Kasubag/Kasie pada Sekretariat, Bidang Pendapatan Asli Daerah, Bidang Perimbangan lain-lain Pendapatan dan Pembiayaan, Bidang Anggaran, Bidang Pembelanjaan dan Bidang Akuntansi agar diprioritaskan mendapatkan anggaran pada tahun 2013.

Kemudian usulan kegiatan tersebut dibawa/dibahas dalam rapat struktural Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang dirangkum menjadi Rancangan Rencana Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang dan disepakati dan diolah serta diajukan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang untuk pembahasan dan kesepakatan dengan Tim Anggaran Kota Magelang. Hasil pembahasan dan kesepakatan dengan Tim Anggaran tersebut untuk selanjutnya menjadi Rencana Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan mempunyai Rencana Tahunan (Renja SKPD) sebagai penjabaran dari Renstra SKPD. Untuk itu berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) jangka waktu 5 tahun Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program, sedangkan Renstra dijabarkan lebih lanjut kedalam perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang.

Sesuai dengan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2012, disebutkan pada Bab. I Pendahuluan bahwa RKPD Kota Magelang tahun 2013 ini merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2011 – 2015, yaitu tahun kedua : perencanaan tahun 2012 untuk dilaksanakan di tahun 2013.

Adapun Visi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang tahun 2011-2015 yaitu "TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN YANG PROFESIONAL, AKUNTABEL, DAN TRANSPARAN", sedangkan makna Visi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang tersebut adalah:

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang Anggaran, pendapatan, perimbangan dan pembiayaan, pembelanjaan, akuntansi, dituntut adanya profesionalisme didalam perencanaan dan pengelolaan keuangan.

Profesional mengandung arti penguasaan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan seluk beluk bidang tugas profesinya (dalam hal ini bidang Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan).

Sedangkan perencanaan keuangan dan pengelolaan keuangan dimaksudkan sebagai suatu proses aktivitas kerja di bidang keuangan yang dimulai dari perencanaan, penggalan, pendataan, pengkoordinasian, penetapan, pemungutan, pembelanjaan, dan akuntansi, pembantuan, penyuluhan, pembinaan, pengawasan, pencatatan, evaluasi dan pelaporan, agar pengelolaan keuangan dapat tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terwujud aparatur yang bersih dan terselenggaranya pemerintahan yang dipercaya. Dengan demikian akan terwujud adanya pemerintahan yang baik (Good Governance) dan sekaligus pemerintah yang bersih (Clean Government). Dengan demikian DPPKD dituntut untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan Visi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang dan guna mewujudkan Visi tersebut diatas telah disusun tiga Misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan aparatur Pengelola Keuangan daerah yang profesional, akuntabel dan transparan
- b. Mengembangkan sistem dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah
- c. Melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja SKPD Tahun 2013 diantaranya adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014;
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor: 28 tahun 2010, Nomor: 0199/M PPN/04/2010, Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013;
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang;
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja;
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005 – 2025;
18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2010 – 2015.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang Tahun 2013 adalah sebagai pedoman dan arah di dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun 2013 bagi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang.

Adapun tujuan dibuatnya Renja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah ini adalah :

1. Sebagai pengendali kegiatan di DPPKD agar terarah dan sesuai dengan Visi, Misi, Strategi, Kebijakan dan Program yang telah ditetapkan;
2. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan;
3. Terwujudnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arah yang terpadu dengan strategi yang tepat dan terukur;
4. Sebagai pedoman penyusunan kegiatan di DPPKD
5. Sebagai dasar dalam mengevaluasi kinerja kegiatan di DPPKD Kota Magelang.

Dengan demikian dokumen Renja DPPKD sebagai pedoman dan arah didalam menyusun anggaran DPPKD dan sebagai dasar penentuan KUA dan PPAS, RKA tahun 2013 oleh Kepala DPPKD Kota Magelang.

1.4. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang Tahun 2013 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memuat Pengertian Renja SKPD, Visi dan Misi SKPD sesuai Renstra SKPD, serta proses penyusunan Renja SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan dari disusunnya Renja SKPD.

1.4. Sistematika Renja SKPD

Mengemukakan sistematika Renja SKPD terkait dengan pengaturan serta penjelasan ringkas isi dari setiap BAB.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2011 DAN CAPAIAN RENSTRA

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2011 dan Capaian Renstra SKPD.

Mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2011, berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan, serta capaian dari target program/kegiatan Renstra SKPD.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD-DPPKD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

Hasil Kajian tersebut dirangkum kedalam tabel Rekapitulasi hasil evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan Renja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun lalu dan Realisasi Renstra Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang.

2.3. isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD DPPKD

Berisikan Sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan mulai dari RPJPD, RPJMD, dan RKPD serta sinkronisasi

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA

Memuat tujuan dan sasaran Renja untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Renstra Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN RENJA

Memuat Program dan kegiatan Tahun 2013 sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran tersebut.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa : catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2011 DAN CAPAIAN RENSTRA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2011 dan Capaian Renstra SKPD :

Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2011, berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan, serta capaian dari target program/kegiatan Renstra Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, adapun tabel evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra SKPD dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel II.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2011
dan Realisasi Capaian Renstra DPPKD Kota Magelang

| Kode | Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015 | Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011 | Taret dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu | | | Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2012) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra | | | |
|------|---|--|--|---|---|---------------------------------|-----------------------|---|--|--|----------|---------|
| | | | | | Target Renja SKPD Tahun 2011 | Realisasi Renja SKPD Tahun 2011 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) | | |
| 120 | | URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, | | | | | | | | | | |
| 120 | 33 | 17 | Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah | Ditetapkannya Perda APBD tepat waktu | | | | | | | | |
| | | | 1 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah | Buku Sisdur Pengelolaan keuangan | 100 Buku | 100 Buku | 85 Buku | 100 Buku | 117.65% | 100 Buku | 285 Buku | 285.00% |
| | | | 2 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi | Perda Pajak dan retribusi daerah | 0 perda | 2 perda | 2 perda | 2 perda | 100.00% | 0 perda | 4 perda | #DIV/0! |
| | | | 3 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD | Raperda dan Perda APBD | 400 buku | 244 buku | 350 buku | 244 buku | 69.71% | 400 buku | 994 buku | 248.50% |
| | | | 4 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD | Raperwal dan Perwal Penjabaran APBD | 275 buku | 169 buku | 275 buku | 169 buku | 61.45% | 275 buku | 719 buku | 261.45% |

| Kode | Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015 | Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011 | Taret dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu | | | Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2012) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra | |
|------|---|---|--|---|---|---------------------------------|-----------------------|---|---|--|
| | | | | | Target Renja SKPD Tahun 2011 | Realisasi Renja SKPD Tahun 2011 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n- | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| | 7 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Tersedianya buku laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD | 468 buku | 468 buku | 465 buku | 468 buku | 100.65% | 468 buku | 1,401 buku | 299.36% |
| | 8 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Tersedianya buku Raperwal dan Perwal | 120 buku | 120 buku | 120 buku | 120 buku | 100.00% | 120 buku | 360 buku | 300.00% |
| | 9 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah | Tercapainya target PAD | 25 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 100.00% | 25 laporan | 49 laporan | 196.00% |
| | 10 Penyusunan Kebijakan Umum APBD | Nota kesepakatan KUA 2012 | 200 buku | 150 buku | 150 buku | 150 buku | 100.00% | 200 buku | 500 buku | 250.00% |
| | 11 Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara | Nota kesepakatan PPAS TA 2012 | 200 buku | 160 buku | 150 buku | 160 buku | 106.67% | 200 buku | 510 buku | 255.00% |
| | 12 Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD | Nota kesepakatan perubahan KUA | 200 buku | 160 buku | 150 buku | 160 buku | 106.67% | 200 buku | 510 buku | 255.00% |
| | 13 Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara | Nota kesepakatan perubahan PPAS TA 2011 | 200 buku | 160 buku | 150 buku | 160 buku | 106.67% | 200 buku | 510 buku | 255.00% |
| | 14 Penelitian DPA SKPD | DPA SKPD sesuai dengan Perda dan Perwal APBD | 48 SKPD | 48 SKPD | 48 SKPD | 48 SKPD | 100.00% | 48 SKPD | 144 SKPD | 300.00% |
| | 15 Pengesahan DPA SKPD | Dokumen pengesahan DPA SKPD | 48 SKPD | 0 SKPD | 48 SKPD | 0 SKPD | 0.00% | 0 SKPD | 48 SKPD | 100.00% |
| | 16 Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak | Tertib administrasi | 88 bendel | 88 bendel | 88 bendel | 88 bendel | 100.00% | 88 bendel | 264 bendel | 300.00% |
| | 17 Pengujian SPM langsung dan penerbitan SP2D SKPD | SP2D SKPD sebagai alat pencairan dana | 1,750 SP2D | 1,750 SP2D | 1,750 SP2D | 1,750 SP2D | 100.00% | 1,750 SP2D | 5,250 SP2D | 300.00% |

| Kode | Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015 | Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011 | Taret dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu | | | Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2012) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra | |
|------|---|---|--|---|---|---------------------------------|-----------------------|---|---|--|
| | | | | | Target Renja SKPD Tahun 2011 | Realisasi Renja SKPD Tahun 2011 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n- | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| | 18 Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek | Sebagai pengendali dalam Pelaksanaan pengeluaran belanja | 48 SKPD | 48 SKPD | 48 SKPD | 48 SKPD | 100.00% | 48 SKPD | 144 SKPD | 300.00% |
| | 19 Pengesahan dan penerbitan SPD | Sebagai dasar penerbitan SPD | 100 SPD | 100 SPD | 100 SPD | 100 SPD | 100.00% | 100 SPD | 300 SPD | 300.00% |
| | 20 Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan | Tersedianya buku laporan keuangan | 864 buku | 696 buku | 696 buku | 696 buku | 100.00% | 864 buku | 2,256 buku | 261.11% |
| | 21 Meneliti dan asistensi laporan keuangan SKPD | Tersedianya bahan laporan keuangan daerah | 552 laporan | 552 laporan | 552 laporan | 552 laporan | 100.00% | 552 laporan | 1,656 laporan | 300.00% |
| | 22 Pengendalian dan penerbitan SPM | Tersedianya SPM sebagai bukti akurat untuk penerbitan SP2D | 1,000 SPM | 2874 SPM | 1,500 SPM | 2874 SPM | 191.60% | 1,000 SPM | 5,374 SPM | 537.40% |
| | 23 Penyusunan laporan data potensi subyek dan obyek pajak | Penerimaan PAD meningkat | 10 bendel | 12 bendel | 12 bendel | 12 bendel | 100.00% | 10 bendel | 34 bendel | 340.00% |
| | 24 Penyusunan dokumen perjanjian reklame dan penempatan | Terpenuhinya target PAD dari Pajak Reklame | 12 bendel | 12 bendel | 12 bendel | 12 bendel | 100.00% | 12 bendel | 36 bendel | 300.00% |
| | 25 Evaluasi bulanan dan triwulanan PAD dan PBB | Penerimaan PAD meningkat | 510 eks | 510 eks | 510 eks | 510 eks | 100.00% | 510 eks | 1,530 eks | 300.00% |
| | 26 Penyusunan anggaran kas | Sebagai rencana penarikan dana setiap triwulan | 75 buku | 75 buku | 75 buku | 75 buku | 100.00% | 75 buku | 225 buku | 300.00% |
| | 27 Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD) | DPPA SKPD sesuai dengan Perda dan Perwal tentang Perubahan APBD | 48 SKPD | 48 SKPD | 48 SKPD | 48 SKPD | 100.00% | 48 SKPD | 144 SKPD | 300.00% |
| | 28 Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD) | Dokumen pengesahan DPPA SKPD | 48 SKPD | 0 SKPD | 0 SKPD | 0 SKPD | #DIV/0! | 0 SKPD | 0 SKPD | 0.00% |

| Kode | Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015 | Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011 | Taret dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu | | | Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2012) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra | |
|------|---|--|--|---|---|---------------------------------|-----------------------|---|---|--|
| | | | | | Target Renja SKPD Tahun 2011 | Realisasi Renja SKPD Tahun 2011 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n- | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| | 29 Penatausahaan Administrasi Dana Perimbangan dan Lain - lain Pendapatan | Tertib administrasi pencairan dan penyerapan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan | 16 laporan | 16 laporan | 16 laporan | 16 laporan | 100.00% | 16 laporan | 48 laporan | 300.00% |
| | 30 Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga | Dokumen sesuai dengan ketentuan | 1,500 buah | 2666 buah | 3,000 buah | 2666 buah | 88.87% | 1,500 buah | 7,166 buah | 477.73% |
| | 31 Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan | Laporan bulanan dan surat menyurat | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 100.00% | 12 laporan | 36 laporan | 300.00% |
| | 32 Penyusunan laporan realisasi dan penatausahaan administrasi pendapatan daerah | Tersedianya laporan pendapatan | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 100.00% | 60 laporan | 84 laporan | 700.00% |
| | 33 Intensifikasi dan inventarisasi data tunggakan pajak daerah | Tercapainya target PAD | 500 WP | 500 WP | 500 WP | 500 WP | 100.00% | 12 WP | 1,012 WP | 202.40% |
| | 34 Pengkajian Permohonan Bantuan Sosial | Sebagai Sebagai dasar penerbitan SP2D Bantuan | 1,500 SP2D | 1515 SP2D | 0 SP2D | 1515 SP2D | #DIV/0! | 1,500 SP2D | 3,015 SP2D | 201.00% |
| | 35 Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah | Terwujudnya pemahaman pengelolaan keuangan daerah | 140 org | 120 org | 0 org | 120 org | #DIV/0! | 140 org | 260 org | 185.71% |
| | 36 Intensifikasi pemungutan PBB | Tercapainya target PBB | 34,000 WP | 33000 WP | 33,000 WP | 33000 WP | 100.00% | 34,000 WP | 100,000 WP | 294.12% |
| | 37 Penyusunan laporan dan penatausahaan administrasi PBB | Penerimaan PBB meningkat | 240 laporan | 240 laporan | 240 laporan | 240 laporan | 100.00% | 240 laporan | 720 laporan | 300.00% |
| | 38 Pengelolaan Pengarsipan dokumen pencairan dana | Dokumen pencairan dana yang ditata | 750 dokumen | 640 dokumen | 750 dokumen | 640 dokumen | 85.33% | 750 dokumen | 2,140 dokumen | 285.33% |
| | 39 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Perda tentang Pajak Daerah | Raperwal pelaksanaan Perda Pajak Daerah | 7 buah | 7 buah | 0 buah | 7 buah | #DIV/0! | 7 buah | 14 buah | 200.00% |

| Kode | Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015 | Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011 | Taret dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu | | | Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2012) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra | |
|------|--|---|--|---|---|---------------------------------|-----------------------|---|---|--|
| | | | | | Target Renja SKPD Tahun 2011 | Realisasi Renja SKPD Tahun 2011 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n- | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| | 40 Penatausahaan administrasi pemungutan BPHTB dan Pajak Air Tanah | Data administrasi pemungutan BPHTB | 12 bendel | 12 bendel | 12 bendel | 12 bendel | 100.00% | 12 bendel | 36 bendel | 300.00% |
| | 41 Penyusunan Rancangan Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah | Sisdur pemungutan Pajak Daerah | 9 buah | 0 buah | 0 buah | 0 buah | #DIV/0! | 9 buah | 9 buah | 100.00% |
| | 42 Penyusunan Perda Pengelolaan PBB | Tersedianya jumlah produk hukum | 0 buah | 0 buah | 0 buah | 0 buah | #DIV/0! | 0 buah | 0 buah | #DIV/0! |
| | 43 Bintek Pengelolaan PBB | Tersedianya SDM siap pakai | 0 org | 0 org | 0 org | 0 org | #DIV/0! | 33,000 org | 33,000 org | #DIV/0! |
| | 44 Pengelolaan data dan Informasi PBB | Jumlah WP-PBB terlayani | 33,000 wp | 0 wp | 0 wp | 0 wp | #DIV/0! | 33,000 wp | 33,000 wp | 100.00% |
| | 45 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | Tersedianya buku laporan prognosis realisasi APBD | 88 buku | 0 buku | 88 buku | 0 buku | 0.00% | 88 buku | 176 buku | 200.00% |
| | 46 Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana | SPJ yang disahkan | 12 dokumen | 2180 dokumen | 0 dokumen | 2180 dokumen | #DIV/0! | 12 dokumen | 2,192 dokumen | 18266.67% |
| | Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | Hasil opini BPK untuk laporan keuangan | | | | | | | | |
| | 1 Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah | Kasus yang ditangani | 10 kasus | 8 kasus | 10 kasus | 8 kasus | 80.00% | 10 kasus | 28 kasus | 280.00% |
| | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah peraturan yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik yang dikeluarkan daerah | | | | | | | | |
| | | Jumlah dengar pendapat dengan masyarakat dalam penyusunan Perda | | | | | | | | |
| | 1 Publikasi peraturan perundang-undangan | Tercapainya target PBB | 17 kel | 17 kel | 17 kel | 17 kel | 100.00% | 33,000 kel | 33,034 kel | 194317.65% |
| | 2 Sosialisasi Peraturan Daerah | Pemahaman masyarakat tentang Perda Pajak Daerah meningkat | 9 perda | 2 perda | 2 perda | 2 perda | 100.00% | 9 perda | 13 perda | 144.44% |

| Kode | Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015 | Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011 | Taret dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu | | | Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2012) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra | |
|------|--|---|--|---|---|---------------------------------|-----------------------|---|---|--|
| | | | | | Target Renja SKPD Tahun 2011 | Realisasi Renja SKPD Tahun 2011 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n- | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| | URUSAN WAJIB KEARSIPAN | | | | | | | | 0 | |
| | Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah | Terlaksananya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah | | | | | | | | |
| | 1 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah | Pengamanan arsip dinas | 6 bidang | 6 bidang | 6 bidang | 6 bidang | 100.00% | 6 bidang | 18 bidang | 300.00% |
| | PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD | | | | | | | | 0 | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tertib administrasi | | | | | | | | |
| | 1 Penyediaan jasa surat menyurat | Tertib administrasi | 5,000 surat | 4500 surat | 5,000 surat | 4500 surat | 90.00% | 5,000 surat | 14,500 surat | 290.00% |
| | 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tersedianya kebutuhan telepon | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100.00% | 12 bulan | 36 bulan | 300.00% |
| | 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Terpenuhinya surat-surat kendaraan | 57 kendaraan | 55 kendaraan | 55 kendaraan | 55 kendaraan | 100.00% | 57 kendaraan | 167 kendaraan | 292.98% |
| | 4 Penyediaan jasa administrasi keuangan | Terpenuhinya personil pengelola keuangan daerah | 35 org | 44 org | 44 org | 44 org | 100.00% | 35 org | 123 org | 351.43% |
| | 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor | Terwujudnya kebersihan di lingkungan DPPKD | 13 jenis | 13 jenis | 13 jenis | 13 jenis | 100.00% | 13 jenis | 39 jenis | 300.00% |
| | 6 Penyediaan alat tulis kantor | Meningkatkan kelancaran tugas dinas | 27 jenis | 27 jenis | 27 jenis | 27 jenis | 100.00% | 27 jenis | 81 jenis | 300.00% |
| | 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Meningkatkan kelancaran tugas dinas | 12 jenis | 12 jenis | 12 jenis | 12 jenis | 100.00% | 12 jenis | 36 jenis | 300.00% |
| | 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya alat penerangan | 11 jenis | 11 jenis | 11 jenis | 11 jenis | 100.00% | 11 jenis | 33 jenis | 300.00% |

| Kode | Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015 | Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011 | Taret dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu | | | Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2012) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra | |
|------|---|--|--|---|---|---------------------------------|-----------------------|---|---|--|
| | | | | | Target Renja SKPD Tahun 2011 | Realisasi Renja SKPD Tahun 2011 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n- | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| | 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman bidang perundang undangan | 2 jenis | 2 jenis | 2 jenis | 2 jenis | 100.00% | 2 jenis | 6 jenis | 300.00% |
| | 10 Penyediaan bahan logistik kantor | Terpenuhinya kebutuhan tabung gas | 24 tabung | 24 tabung | 24 tabung | 24 tabung | 100.00% | 24 tabung | 72 tabung | 300.00% |
| | 11 Penyediaan makanan dan minuman | Terpenuhinya kebutuhan makan minum rapat, harian dan tamu | 3,250 set | 2975 set | 320 set | 2975 set | 929.69% | 3,250 set | 6,545 set | 201.38% |
| | 12 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Koordinasi daerah tercapai | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100.00% | 12 bulan | 36 bulan | 300.00% |
| | 13 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap | Guna memperlancar tugas | 6 org | 6 org | 6 org | 6 org | 100.00% | 6 org | 18 org | 300.00% |
| | 14 Pengelolaan administrasi kepegawaian | Kelancaran urusan kepegawaian | 78 bendel | 78 bendel | 78 bendel | 78 bendel | 100.00% | 78 bendel | 234 bendel | 300.00% |
| | 15 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | 0 jenis | 0 jenis | 0 jenis | 0 jenis | #DIV/0! | 3 jenis | 3 jenis | #DIV/0! |
| | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | | | | | | | | | |
| | 1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Meningkatkan kinerja aparatur | 22 unit | 1 unit | 0 unit | 1 unit | #DIV/0! | 22 unit | 23 unit | 104.55% |
| | 2 Pengadaan peralatan gedung kantor | Tersedianya peralatan kantor untuk peningkatan kinerja | 9 unit | 6 unit | 6 unit | 6 unit | 100.00% | 9 unit | 21 unit | 233.33% |
| | 3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Meningkatkan kenyamanan tugas | 12 unit | 6 unit | 16 unit | 6 unit | 37.50% | 12 unit | 34 unit | 283.33% |
| | 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Terpeliharanya kendaraan dinas | 58 unit | 55 unit | 58 unit | 55 unit | 94.83% | 58 unit | 171 unit | 294.83% |
| | 5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Terpeliharanya perlengkapan gedung | 10 unit | 10 unit | 10 unit | 10 unit | 100.00% | 10 unit | 30 unit | 300.00% |

| Kode | Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015 | Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011 | Taret dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu | | | Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2012) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra | |
|------|---|---|--|---|---|---------------------------------|-----------------------|---|---|--|
| | | | | | Target Renja SKPD Tahun 2011 | Realisasi Renja SKPD Tahun 2011 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n- | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| | 6 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | Terpeliharanya sarana kerja kantor | 111 unit | 30 unit | 30 unit | 30 unit | 100.00% | 111 unit | 171 unit | 154.05% |
| | 7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor | Terpeliharanya peralatan kantor | 119 unit | 116 unit | 116 unit | 116 unit | 100.00% | 119 unit | 351 unit | 294.96% |
| | 8. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | | 2 unit | 2 unit | 0 unit | 2 unit | #DIV/0! | 2 unit | 4 unit | 200.00% |
| | 9. Pengadaan Meubeler | | 6 unit | 2 unit | 0 unit | 2 unit | #DIV/0! | 6 unit | 8 unit | 133.33% |
| | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | | | | | | | | |
| | 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Sebagai pedoman pelaksanaan kinerja | 9 jenis | 9 jenis | 8 jenis | 9 jenis | 112.50% | 9 jenis | 26 jenis | 288.89% |
| | 2 Penyusunan laporan keuangan semesteran | Tersedianya laporan keuangan semesteran yang akurat dan akuntabel | 3 bendel | 3 bendel | 3 bendel | 3 bendel | 100.00% | 3 bendel | 9 bendel | 300.00% |
| | 3 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD | Tersedianya laporan pengelolaan keuangan SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100.00% | 12 bulan | 36 bulan | 300.00% |

Pelaksanaan Renja DPPKD Tahun 2013 sebagian besar terlaksana sesuai output yang diharapkan. Jika dilihat dari serapan anggaran, ada beberapa kegiatan yang perlu diefisienkan.

Berdasarkan amanat Permendagri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 bahwa perlu disusun RKPD Tahun 2013 sebagai dasar penyusunan KUA-PPA yang nantinya ditetapkan menjadi APBD Tahun 2013.

Selain itu, dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pengelolaan Keuangan dalam hal Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diperlukan tambahan pengetahuan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah mengingat tidak semua aparatur di Pemerintah Kota Magelang memiliki latar belakang Pengelolaan Keuangan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pelaksanaan program kegiatan pada DPPKD Kota Magelang pada tahun 2011 sebagian besar dapat memenuhi target output pada tahun berkenaan. Jika dikaitkan dengan pencapaian indikator pencapaian renstra, kinerja Bappeda secara detail dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Magelang

| NO | Indikator | SPM/ Standar Nasional | IKU/ IKK | Target Renstra SKPD | | | | | Realisasi Capaian Tahun 2011 | Proyeksi | | | | Catatan Analisis |
|-----|--|-----------------------------|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | Tahun 2011 | Tahun 2012 | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 | | Tahun 2012 | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (7) | (8) | (10) | (11) | | | |
| | Keselarasn dan Efektivitas Hubungan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat serta antar Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan Otonomi Daerah. | | Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja berdasarkan PP 8/2006 | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | |
| | Keselarasan antara Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah Pusat | | Waktu penetapan PERDA APBD 2011 | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | |
| | | | Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005 | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | |
| | Intensitas dan efektivitas proses konsultasi Publik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan public yang strategis dan relevan untuk daerah | | Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website, kotakpos, bag/biro humas, leaflet/brosur | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | |
| | Transparansi dalam pemanfaatan alokasi pencairan dan penyerapan DAU, DAK dan Bagi Hasil | | Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan | | | | | | 101,05 % | 100,40 % | | | | |
| | | | Belanja publik terhadap DAU | | | | | | 69,74 % | 190,13 % | | | | |
| | | | Belanja langsung terhadap total APBD | | | | | | 43,47 % | 99,02% | | | | |

| NO | Indikator | SPM/ Standar Nasional | IKU/ IKK | Target Renstra SKPD | | | | | Realisasi Capaian Tahun 2011 | Proyeksi | | | | Catatan Analisis |
|-----|--|-----------------------------|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | Tahun 2011 | Tahun 2012 | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 | | Tahun 2012 | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (7) | (8) | (10) | (11) | | | |
| | Intensitas, efektifitas dan transparansi pemungutan sumber-sumber PAD dan pinjaman / obligasi Daerah | | Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD (Realisasi) | | | | | 12,57 % | 14,24% | | | | | |
| | Efektifitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha pertanggung jawaban dan pengawasan APBD | | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP | | |
| | | | Rasio SILPA terhadap total pendapatan | | | | | 7,02 % | 0,00% | | | | | |
| | | | Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja | | | | | 87,22 % | 83,46% | | | | | |
| | Pengelolaan Potensi Daerah | | Rasio realisasi PAD 2011 terhadap potensi PAD | | | | | 102,34 % | 99,14% | | | | | |
| | | | Peningkatan PAD | | | | | 5,05 % | 32,78% | | | | | |

Tingkat capaian kinerja dalam rangka dukungan terhadap pencapaian visi misi Walikota Magelang, program dan kegiatan DPPKD Kota Magelang mendukung pada pencapaian misi pertama yaitu *Menciptakan Pemerintahan yang bersih dan profesional dengan peningkatan kapasitas dan responsifitas aparatur yang didasarkan pada nilai-nilai kebenaran dan berkeadilan.*

Dalam pencapaian misi tersebut, DPPKD Kota Magelang mendukung dalam pencapaian kualitas Sumber daya aparatur pengelola Keuangan Daerah yang bersih, responsif, bertanggung jawab dan akuntabel dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Peningkatan Sumber Day Manusia.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelayanan SKPD, jika dilihat dari pencapaian indikator kinerja dan SPM sudah mampu dipenuhi dan dilaksanakan. Pencapaian dari segi kuantitas sudah dapat dicapai tetapi masih perlu dikaji lagi tingkat pencapaian dari segi kualitas dokumen yang dihasilkan.

Gambaran isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah diantaranya adalah :

- a) Dengan diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD maka terhitung sejak 1 Januari 2011 Pemerintah Kota Magelang akan memungut 2 jenis Pajak baru yaitu BPHTB dan Pajak Air Tanah serta PBB paling lambat tahun 2014
- b) Laporan pengelolaan keuangan dari SKPD mengakibatkan hasil opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang masih WDP
- c) Ditetapkannya Permendagri No. 59 Tahun 2007 memberi implikasi dimana daerah selalu mengalami perubahan peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah, sehingga mengalami kesulitan dalam aplikasinya.
- d) Sosialisasi kepada masyarakat tentang Peralihan kewenangan pemungutan dan pengelolaan BPHTB dan Pajak Air Tanah, PBB.
- e) Peningkatan pemahaman SDM berkaitan dengan pengelolaan BPHTB dan Pajak Air Tanah & PBB

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan sistem pemerintahan sentralistik selama Pemerintahan Orde Baru ternyata rapuh dan menciptakan kesenjangan ekonomi serta kemiskinan yang besar. Kondisi tersebut diperparah oleh krisis ekonomi yang menyebabkan kualitas pelayanan publik terganggu dan seluruh sektor perekonomian mengalami kontraksi sehingga mengakibatkan krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang direvisi menjadi Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004, mempunyai konsekuensi yang serius dalam pelayanan publik dan kinerja ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia.

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2001 merupakan peluang bagi Pemerintah Daerah di Indonesia untuk melaksanakan serta membiayai sendiri kemajuan pembangunan di daerahnya masing-masing.

Desentralisasi merupakan peralihan kewenangan dari lingkungan pemerintah pusat (central government) untuk mengatur ke lingkungan pemerintah daerah (local government) untuk mengatur dan mengurus daerahnya berdasarkan kondisi riil yang mengitarinya (Kaloh, 2002). Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip *money should follow function* merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan (Bahl, 2000). Artinya setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut.

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dalam kaitan dengan kebijakan keuangan negara yaitu untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (fiscal sustainability) dan memberikan stimulus terhadap aktifitas perekonomian masyarakat. Dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan akan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang sepadan dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom.

Desentralisasi fiskal juga merupakan salah satu pilar dalam memelihara kesetabilan kondisi ekonomi nasional karena transfer dana ke daerah akan mendorong aktifitas perekonomian masyarakat di daerah. Desentralisasi fiskal tersebut dikelompokkan menjadi dua, sebagai berikut :

1. Dana Perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan maksud menciptakan keadilan, pemerataan, dan memperkecil kesenjangan fiskal antar daerah. Dana perimbangan itu berasal dari penerimaan dalam negeri yang diperoleh dari pendapatan perpajakan, royalti dan bagi hasil sumber daya alam.
2. Dana yang bersumber dari hutang dalam negeri dan luar negeri yang disalurkan ke daerah (subsidiary loan) baik dari hutang bilateral maupun multilateral.

Secara umum tujuan pemerintah pusat melakukan transfer dana kepada pemerintah daerah adalah :

1. Sebagai tindakan nyata untuk mengurangi ketimpangan pembagian 'kue nasional' baik vertikal maupun horozontal.
2. Sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah dengan menyerahkan sebagian kewenangan di bidang pengelolaan keuangan negara dan agar manfaat yang dihasilkan dapat dinikmati oleh rakyat di daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja pada SKPD DPPKD Kota Magelang adalah sebagai berikut:

MISI I , mempunyai tiga tujuan yaitu:

Tujuan Pertama :

Peningkatan kemampuan aparatur dibidang pengelolaan keuangan daerah.

Dengan sasaran:

Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Tujuan Kedua:

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur DPPKD untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan sasaran:

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur DPPKD dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Tujuan Ketiga:

Mewujudkan tertib hukum pada aparatur dan masyarakat tentang pendapatan daerah.

Dengan sasaran: Pemahaman masyarakat wajib pajak/retribusi dan wajib pajak bumi dan bangunan mengenai produk hukum.

MISI II mempunyai tiga tujuan.

Tujuan Pertama :

Meningkatkan tertib administrasi keuangan daerah.

Dengan sasaran:

Terwujudnya sistem administrasi yang efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan daerah

Tujuan Kedua:

Peningkatan pengelolaan keuangan dan ratio penerimaan daerah terhadap pengeluaran SKPD.

Dengan sasaran:

Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.

Tujuan Ketiga:

Memfasilitasi kinerja aparatur dalam penerimaan pendapatan.

Dengan sasaran:

Peningkatan perekonomian masyarakat.

MISI III mempunyai satu tujuan yaitu:

Tujuan Pertama :

Meningkatkan kinerja aparatur dalam penerimaan pendapatan

Dengan sasaran:

Terwujudnya koordinasi dalam rangka peningkatan kinerja aparatur

Tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2013 dirangkum dalam tabel berikut:

**Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
DPPKD Kota Magelang
Tahun 2013**

TUJUAN PERTAMA :

| No | Sasaran | Program | Kegiatan |
|----|--|--|--|
| 1 | Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah | Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah | Pembinaan pengelolaan keuangan dan Implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah |
| 2 | Tersedianya sarana dan prasarana aparatur DPPKD dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat | Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik |
| | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor |
| | | | Pengadaan Perlengkapan gedung kantor |
| 3 | Pemahaman wajib pajak/retribusi dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan mengenai produk hukum | Penataan peraturan perundang-undangan | Publikasi peraturan perundang-undangan |
| | | | Sosialisasi Peraturan Daerah |

TUJUAN KEDUA :

| No | Sasaran | Program | Kegiatan |
|---|--|--|--|
| 1 | Terwujudnya sistem administrasi yang efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan daerah | Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD |
| | | | Penyusunan Laporan pengelolaan keuangan SKPD |
| | | | Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana |
| | | Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan | Penyusunan KUA dan PPAS |
| | | | Penelitian DPA dan DPPA |
| | | | Pelaporan dan Penatausahaan administrasi gaji PNS/Kontrak |
| | | | Pengujian SPM langsung dan Penerbitan SP2D SKPD |
| | | | Penyusunan laporan keuangan semesteran |
| | | | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran |
| | | | Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan |
| | | | Penyusunan laporan data potensi subyek dan obyek pajak |
| | | | Penyusunan dokumen perjanjian reklame dan penempatan |
| | | | Penyusunan laporan dan penatausahaan administrasi PBB |
| | | | Penataan administrasi pemungutan BPHTB dan Pajak air tanah |
| Pengelolaan pengarsipan dokumen pencairan dana | | | |
| Penatausahaan administrasi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan | | | |
| Penatausahaan administrasi belanja bantuan keuangan dan tak terduga | | | |
| Penyusunan laporan realisasi dan penatausahaan administrasi pendapatan daerah | | | |

| No | Sasaran | Program | Kegiatan |
|----|---|--|--|
| 2 | Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip tata kelola keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan. | Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | Penyusunan Raperda tentang Pajak dan retribusi daerah |
| | | | Penyusunan raperda dan Raperwal APBD |
| | | | Penyusunan Rancangan sisdur pemungutan Pajak daerah |
| | | | Penataan pengelolaan dokumen pencairan dana |
| 3 | Peningkatan Perekonomian masyarakat | Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan |
| | | | Penyusunan raperda dan Raperwal APBD |

TUJUAN KETIGA :

| No | Sasaran | Program | Kegiatan |
|----|--|--|--|
| 1 | Terwujudnya koordinasi dalam rangka peningkatan kinerja aparatur | Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | Evaluasi bulanan dan triwulanan PAD dan PBB |
| | | | Intensifikasi dan inventarisasi data tunggakan pajak daerah |
| | | | Intensifikasi pemungutan PBB |
| | | | Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah |

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program, kegiatan dan pendanaan, disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana, dengan sumber pendanaan pembangunan daerah yang terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

Sementara itu PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 32 ayat (1) disebutkan bahwa " Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD menggunakan bahan dari Rencana Kerja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah ".

Oleh sebab itu Rencana Kerja SKPD Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah disusun dengan bentuk matrik yang berisikan penjelasan mengenai urusan program dan kegiatan prioritas, beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif untuk tahun 2012 s/d tahun 2013 serta sumber dana kegiatan.

MATRIK RENCANA KERJA TAHUN 2013
SKPD DPPKD KOTA MAGELANG

| NO | URUSAN / PROGRAM KERJA / KEGIATAN | PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA CAPAIAN | | PAGU INDIKATIF | | | | | | SUMBER DANA | LOKASI | KETERANGAN |
|----|--|-----------|--|---------|----------------|------------------|------|------------------|------|------------------|-------------|---------------|--|
| | | | TOLOK UKUR | SATUAN | TAR1 | Tahun 2011 | TAR2 | Tahun 2012 | TAR3 | Tahun 2013 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, | | | | | 3,108,776,000.00 | | 5,091,888,000.00 | | 4,855,238,000.00 | | | |
| 1 | Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah | | Tingkat Capaian Kinerja Pemerintah Kota | % | 100 | 3,037,712,000.00 | 100 | 4,953,049,000.00 | 100 | 4,716,238,000.00 | | | |
| | 1 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah | 2 | Buku Sisdur Pengelolaan Keuangan | Buku | 0 | 0.00 | 0 | 52,000,000.00 | 0 | 4,225,000.00 | | Kota Magelang | Pagu indikatif th. 2012 sebesar Rp. 4.220,- kekurangan sebesar Rp. 47.780.000,- diambilkan dari kegiatan Penatausahaan administrasi belanja langsung dan tidak langsung th. 2012 yang tidak direalisasikan |
| | 2 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi | 1 | Perda Pajak dan Retribusi Daerah | Raperda | 2 | 55,360,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | Kota Magelang | |
| | 3 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD | 1 | Raperda dan Perda APBD 2012 | Buku | 320 | 175,049,000.00 | 320 | 331,117,000.00 | 320 | 335,000,000.00 | | Kota Magelang | |
| | 4 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD | 1 | Raperwal dan Perwal Penjabaran APBD 2012 | Buku | 320 | 137,275,000.00 | 320 | 212,549,000.00 | 320 | 215,000,000.00 | | Kota Magelang | |
| | 5 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD | 1 | Raperda dan Perda Perubahan APBD 2012 | Buku | 220 | 176,588,000.00 | 220 | 332,837,000.00 | 220 | 335,000,000.00 | | Kota Magelang | |

| NO | URUSAN / PROGRAM KERJA / KEGIATAN | PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA CAPAIAN | | PAGU INDIKATIF | | | | | | SUMBER DANA | LOKASI | KETERANGAN |
|----|---|-----------|--|------------------------|----------------|----------------|------|----------------|------|----------------|-------------|---------------|------------|
| | | | TOLOK UKUR | SATUAN | TAR1 | Tahun 2011 | TAR2 | Tahun 2012 | TAR3 | Tahun 2013 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 6 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD | 1 | Raperwal dan Perwal Penjabaran Perubahan APBD 2012 | Buku | 320 | 137,101,000.00 | 320 | 213,421,000.00 | 320 | 215,000,000.00 | | Kota Magelang | |
| | 7 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | 1 | Jumlah Buku Raperda dan Perda Pertanggung jawaban APBD | Buku | 468 | 192,650,000.00 | 468 | 304,245,000.00 | 468 | 310,000,000.00 | | Kota Magelang | |
| | 8 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | 1 | Buku Raperwal dan Perwal Pertanggung jawaban APBD | Buku | 120 | 30,565,000.00 | 120 | 186,367,000.00 | 120 | 190,000,000.00 | | Kota Magelang | |
| | 9 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah | 1 | Data PAD | Bendel | 1 | 158,428,000.00 | 1 | 171,635,000.00 | 1 | 175,000,000.00 | | Kota Magelang | |
| | 10 Penyusunan Kebijakan Umum APBD | 1 | Dokumen KUA | Buku | 150 | 76,907,000.00 | 150 | 100,499,000.00 | 150 | 102,500,000.00 | | Kota Magelang | |
| | 11 Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara | 1 | Dokumen PPAS | Buku | 160 | 59,872,000.00 | 160 | 95,101,000.00 | 160 | 96,000,000.00 | | Kota Magelang | |
| | 12 Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD | 1 | Dokumen Perubahan KUA 2012 | Buku | 160 | 75,744,000.00 | 160 | 113,105,000.00 | 160 | 115,000,000.00 | | Kota Magelang | |
| | 13 Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara | 1 | Dokumen Perubahan PPAS 2012 | Dokumen PPAS Perubahan | 160 | 50,598,000.00 | 160 | 92,131,000.00 | 160 | 93,000,000.00 | | Kota Magelang | |

| NO | URUSAN / PROGRAM KERJA / KEGIATAN | PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA CAPAIAN | | PAGU INDIKATIF | | | | | | SUMBER DANA | LOKASI | KETERANGAN |
|----|---|-----------|--|---------|----------------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------------|---------------|---|
| | | | TOLOK UKUR | SATUAN | TAR1 | Tahun 2011 | TAR2 | Tahun 2012 | TAR3 | Tahun 2013 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 14 Penelitian DPA SKPD | 1 | DPA SKPD yang diteliti | SKPD | 48 | 43,933,000.00 | 48 | 87,083,000.00 | 48 | 88,000,000.00 | | Kota Magelang | |
| | 15 Pengesahan DPA SKPD | 1 | Dokumen pengesahan DPA SKPD | SKPD | 0 | 0.00 | 48 | 55,102,000.00 | 48 | 56,000,000.00 | | Kota Magelang | |
| | 16 Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak | 1 | Laporan bulanan dan triwulan | Bendel | 88 | 89,212,000.00 | 88 | 98,133,000.00 | 88 | 99,000,000.00 | | Kota Magelang | |
| | 17 Pengujian SPM langsung dan penerbitan SP2D SKPD | 1 | Penerbitan SP2D | SP2D | 1,750 | 35,786,000.00 | 1,750 | 33,402,000.00 | 1,750 | 35,000,000.00 | | Kota Magelang | |
| | 18 Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek | 1 | Dokumen pengajuan belanja langsung yg sesuai ketentuan | SKPD | 48 | 122,458,000.00 | 48 | 137,036,000.00 | 48 | 138,000,000.00 | | Kota Magelang | |
| | 19 Pengesahan dan penerbitan SPD | 1 | SPD yang diterbitkan | SPD | 100 | 11,302,000.00 | 100 | 25,714,000.00 | 100 | 26,000,000.00 | | Kota Magelang | |
| | 20 Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan | 1 | Buku Laporan Keuangan konsolidasi | Buku | 696 | 145,996,000.00 | 696 | 267,174,000.00 | 696 | 268,000,000.00 | | Kota Magelang | |
| | 21 Meneliti dan asistensi laporan keuangan SKPD | 1 | Laporan keuangan yang diteiti | Laporan | 552 | 30,500,000.00 | 552 | 61,000,000.00 | 552 | 62,000,000.00 | | Kota Magelang | |
| | 22 Pengendalian dan penerbitan SPM | 1 | SPM yang diterbitkan | SPM | 1,000 | 32,231,000.00 | 1,000 | 41,513,000.00 | 1,000 | 41,513,000.00 | | Kota Magelang | Th 2012 bertambah dari penggeseran anggaran kegiatan Subag Keuangan |
| | 23 Penyusunan laporan data potensi subyek dan obyek pajak | 1 | Data potensi subyek dan obyek pajak | Bendel | 12 | 27,541,000.00 | 12 | 31,683,000.00 | 12 | 32,000,000.00 | | Kota Magelang | |

| NO | URUSAN / PROGRAM KERJA / KEGIATAN | PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA CAPAIAN | | PAGU INDIKATIF | | | | | | SUMBER DANA | LOKASI | KETERANGAN |
|----|---|-----------|---|---------|----------------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------------|---------------|------------|
| | | | TOLOK UKUR | SATUAN | TAR1 | Tahun 2011 | TAR2 | Tahun 2012 | TAR3 | Tahun 2013 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 24 Penyusunan dokumen perjanjian reklame dan penempatan | 1 | dokumen perjanjian reklame | Bendel | 12 | 34,129,000.00 | 12 | 35,850,000.00 | 12 | 36,000,000.00 | | Kota Magelang | |
| | 25 Evaluasi bulanan dan triwulanan PAD dan PBB | 1 | Laporan realisasi PAD | Eksp | 510 | 45,991,000.00 | 510 | 45,991,000.00 | 510 | 46,000,000.00 | | Kota Magelang | |
| | 26 Penyusunan anggaran kas | 1 | Perwal tentang penetapan anggaran kas | Perwal | 75 | 12,153,000.00 | 75 | 14,049,000.00 | 75 | 15,000,000.00 | | Kota Magelang | |
| | 27 Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD) | 1 | DPPD SKPD yang diteliti | SKPD | 48 | 42,851,000.00 | 48 | 85,333,000.00 | 48 | 86,000,000.00 | | Kota Magelang | |
| | 28 Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD) | 1 | DPPA SKPD yang disahkan | SKPD | 0 | 0.00 | 48 | 53,352,000.00 | 48 | 54,000,000.00 | | Kota Magelang | |
| | 29 Penatausahaan Administrasi Dana Perimbangan dan Lain - lain Pendapatan | 1 | Laporan bulanan dan triwulan pencairan dana perimbangan | Laporan | 16 | 129,748,000.00 | 16 | 142,723,000.00 | 16 | 143,000,000.00 | | Kota Magelang | |
| | 30 Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga | 1 | Jumlah SP2D bantuan dan tak terduga | Buah | 3,000 | 83,041,000.00 | 3,000 | 113,105,000.00 | 3,000 | 115,000,000.00 | | Kota Magelang | |
| | 31 Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan | 1 | Terkoordinasinya dan terdatanya tertib administrasi laporan | Laporan | 12 | 104,590,000.00 | 12 | 104,790,000.00 | 12 | 105,000,000.00 | | Kota Magelang | |
| | 32 Penyusunan laporan realisasi dan penatausahaan administrasi pendapatan daerah | 1 | Buku Laporan Realisasi pendapatan | Laporan | 60 | 42,379,000.00 | 60 | 47,179,000.00 | 60 | 48,000,000.00 | | Kota Magelang | |

| NO | URUSAN / PROGRAM KERJA / KEGIATAN | PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA CAPAIAN | | PAGU INDIKATIF | | | | | | SUMBER DANA | LOKASI | KETERANGAN |
|----|---|-----------|---|---------|----------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-------------|---------------|---|
| | | | TOLOK UKUR | SATUAN | TAR1 | Tahun 2011 | TAR2 | Tahun 2012 | TAR3 | Tahun 2013 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 33 Intensifikasi dan inventarisasi data tunggakan pajak daerah | 1 | Data tunggakan pajak | WP | 500 | 20,223,000.00 | 500 | 16,017,000.00 | 500 | 17,000,000.00 | | Kota Magelang | |
| | 34 Pengkajian Permohonan Bantuan Sosial | 1 | Jumlah persetujuan walikota | Lembar | 1,500 | 121,570,000.00 | 1,500 | 125,000,000.00 | 1,500 | 130,000,000.00 | | Kota Magelang | |
| | 35 Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah | 1 | Jumlah bendahara dan PPK yang dibina | Orang | 120 | 63,456,000.00 | 120 | 126,913,000.00 | 120 | 130,000,000.00 | | Kota Magelang | Ganti nama kegiatan, semula Bintek Implementasi |
| | 36 Intensifikasi pemungutan PBB | 1 | Jumlah WP terlayani | WP | 33,000 | 250,350,000.00 | 33,000 | 309,000,000.00 | 33,000 | 310,000,000.00 | | Kota Magelang | |
| | 37 Penyusunan laporan dan penatausahaan administrasi PBB | 1 | Tersedianya jumlah laporan | Laporan | 240 | 89,600,000.00 | 240 | 150,000,000.00 | 240 | 150,000,000.00 | | Kota Magelang | Penambahan anggaran pd tahun 2012 dan 2013, dikarenakan pelimpahan kewenangan PBB dari Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah sesuai amanat UU No. 28 Tahun 2009 dan untuk cakupan WP-PBB secara menyeluruh |
| | 38 Pengelolaan Pengarsipan dokumen pencairan dana | 1 | Dokumen pencairan dana yang ditata | Box | 750 | 60,425,000.00 | 750 | 66,515,000.00 | 750 | 67,000,000.00 | | Kota Magelang | Ganti nama kegiatan, semula Penataan Pengelolaan dokumen pencairan dana |
| | 39 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Perda tentang Pajak Daerah | 1 | Raperwal pelaksanaan Perda Pajak Daerah | Perwal | 7 | 21,554,000.00 | 7 | 21,554,000.00 | 0 | 0.00 | | Kota Magelang | Kegiatan baru pada th. 2011, dengan adanya pelimpahan pengelolaan Pajak dari provinsi |
| | 44 Penatausahaan administrasi pemungutan BPHTB dan Pajak Air Tanah | 1 | Data administrasi pemungutan BPHTB | Bendel | 12 | 30,225,000.00 | 12 | 32,500,000.00 | 12 | 33,000,000.00 | | Kota Magelang | Kegiatan baru pada th. 2011, dengan adanya pelimpahan pengelolaan Pajak dari provinsi |
| | 45 Penyusunan Rancangan Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah | 1 | Sisdur pemungutan Pajak | Buku | 9 | 20,331,000.00 | 9 | 20,331,000.00 | 0 | 0.00 | | Kota Magelang | Kegiatan baru pada th. 2011, dengan adanya pelimpahan pengelolaan Pajak dari provinsi |

| NO | URUSAN / PROGRAM KERJA / KEGIATAN | PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA CAPAIAN | | PAGU INDIKATIF | | | | | | SUMBER DANA | LOKASI | KETERANGAN |
|----|---|-----------|--|--------|----------------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|-------------|---------------|---|
| | | | TOLOK UKUR | SATUAN | TAR1 | Tahun 2011 | TAR2 | Tahun 2012 | TAR3 | Tahun 2013 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 46 Penyusunan Perda Pengelolaan PBB | 1 | Tersedianya jumlah produk hukum | Buah | 0 | 0.00 | 1 | 100,000,000.00 | 0 | 0.00 | | Kota Magelang | Penambahan anggaran pd tahun 2012, dikarenakan pelimpahan kewenangan PBB dari Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah sesuai amanat UU No. 28 Tahun 2009 dan untuk cakupan WP-PBB secara menyeluruh |
| | 47 Bintek Pengelolaan PBB | 1 | Tersedianya SDM siap pakai | Orang | 0 | 0.00 | 15 | 100,000,000.00 | 0 | 0.00 | | Kota Magelang | Penambahan anggaran pd tahun 2012, dikarenakan pelimpahan kewenangan PBB dari Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah sesuai amanat UU No. 28 Tahun 2009 dan untuk cakupan WP-PBB secara menyeluruh |
| | 48 Pengelolaan data dan Informasi PBB | 1 | Jumlah WP-PBB terlayani | WP | 0 | 0.00 | 33,000 | 200,000,000.00 | 33,000 | 200,000,000.00 | | Kota Magelang | Penambahan anggaran pd tahun 2012 dan 2013, dikarenakan pelimpahan kewenangan PBB dari Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah sesuai amanat UU No. 28 Tahun 2009 dan untuk cakupan WP-PBB secara menyeluruh |
| 2 | Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | | Hasil opini BPK untuk Laporan Keuangan | % | 100 | 14,000,000.00 | 100 | 14,000,000.00 | 100 | 14,000,000.00 | | | |
| | 1 Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah | | Kasus yang ditangani | kasus | 10 | 14,000,000.00 | 10 | 14,000,000.00 | 10 | 14,000,000.00 | | Kota Magelang | Dalam matrik Renja awal belum teranggarkan |

| NO | URUSAN / PROGRAM KERJA / KEGIATAN | PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA CAPAIAN | | PAGU INDIKATIF | | | | | | SUMBER DANA | LOKASI | KETERANGAN |
|----|---|-----------|---|-----------|----------------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|-------------------------|-------------|---------------|---|
| | | | TOLOK UKUR | SATUAN | TAR1 | Tahun 2011 | TAR2 | Tahun 2012 | TAR3 | Tahun 2013 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | | | % | 100 | 57,064,000.00 | 100 | 124,839,000.00 | 100 | 125,000,000.00 | | | |
| | 1 Publikasi peraturan perundang-undangan | | Jumlah WP-PBB terlayani | Kelurahan | 17 | 19,240,000.00 | 17 | 100,000,000.00 | 17 | 100,000,000.00 | | Kota Magelang | Penambahan anggaran pd tahun 2012 dan 2013, dikarenakan pelimpahan kewenangan PBB dari Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah sesuai amanat UU No. 28 Tahun 2009 dan untuk cakupan WP-PBB secara menyeluruh |
| | 2 Sosialisasi Peraturan Daerah | | Perda yang disosialisasikan | Perda | 2 | 37,824,000.00 | 2 | 24,839,000.00 | 2 | 25,000,000.00 | | Kota Magelang | |
| | URUSAN WAJIB KEARSIPAN | | | | | 23,648,000.00 | | 36,319,000.00 | | 33,966,000.00 | | | |
| 1 | Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah | | Terlaksananya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah | % | 100 | 23,648,000.00 | 100 | 36,319,000.00 | 100 | 33,966,000.00 | | | |
| | 1 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah | 2 | Jumlah unit arsip | bidang | 6 | 23,648,000.00 | 6 | 36,319,000.00 | 6 | 33,966,000.00 | | Kota Magelang | |
| | PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD | | | | | 1,552,085,000.00 | | 4,182,190,000.00 | | 1,853,645,000.00 | | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | % | 100 | 692,247,000.00 | 100 | 784,367,000.00 | 100 | 789,395,000.00 | | | |
| | 1 Penyediaan jasa surat menyurat | 2 | Surat masuk dan keluar | surat | 5,000 | 7,000,000.00 | 5,000 | 10,500,000.00 | 5,000 | 11,000,000.00 | | Kota Magelang | |

| NO | URUSAN / PROGRAM KERJA / KEGIATAN | PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA CAPAIAN | | PAGU INDIKATIF | | | | | | SUMBER DANA | LOKASI | KETERANGAN |
|----|--|-----------|---|-----------|----------------|----------------|------|----------------|------|----------------|-------------|---------------|---|
| | | | TOLOK UKUR | SATUAN | TAR1 | Tahun 2011 | TAR2 | Tahun 2012 | TAR3 | Tahun 2013 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 2 | Jumlah rekening telepon | Rekening | 12 | 7,200,000.00 | 12 | 8,500,000.00 | 12 | 13,000,000.00 | | Kota Magelang | |
| | 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 2 | Jumlah kendaraan dan kelengkapan | Kendaraan | 55 | 28,540,000.00 | 55 | 28,540,000.00 | 55 | 28,540,000.00 | | Kota Magelang | |
| | 4 Penyediaan jasa administrasi keuangan | 2 | Jumlah personil pengelolaan keuangan | orang | 44 | 330,000,000.00 | 44 | 349,200,000.00 | 44 | 349,200,000.00 | | Kota Magelang | Pengurangan sebesar Rp. 600.000,- di tahun 2012 |
| | 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor | 2 | Peralatan kebersihan | jenis | 13 | 5,170,000.00 | 13 | 5,500,000.00 | 13 | 5,600,000.00 | | Kota Magelang | |
| | 6 Penyediaan alat tulis kantor | 2 | Alat tulis kantor | jenis | 27 | 10,000,000.00 | 27 | 18,700,000.00 | 27 | 19,000,000.00 | | Kota Magelang | |
| | 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 2 | Barang cetakan dan penggandaan | jenis | 12 | 20,000,000.00 | 12 | 55,000,000.00 | 12 | 56,000,000.00 | | Kota Magelang | |
| | 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 2 | Peralatan penerangan gedung | jenis | 11 | 5,000,000.00 | 11 | 6,050,000.00 | 11 | 6,500,000.00 | | Kota Magelang | |
| | 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 2 | Bahan bacaan | jenis | 2 | 2,000,000.00 | 2 | 2,400,000.00 | 2 | 2,500,000.00 | | Kota Magelang | |
| | 10 Penyediaan bahan logistik kantor | 2 | Logistik kantor | tabung | 24 | 2,000,000.00 | 24 | 6,818,000.00 | 24 | 6,900,000.00 | | Kota Magelang | |
| | 11 Penyediaan makanan dan minuman | 2 | tersedianya Makan dan minum harian | set | 320 | 36,190,000.00 | 320 | 45,000,000.00 | 320 | 45,000,000.00 | | Kota Magelang | |
| | 12 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 2 | Terlaksananya Koordinasi daerah | bulan | 12 | 146,400,000.00 | 12 | 146,400,000.00 | 12 | 146,400,000.00 | | Kota Magelang | Th. 2012 pagu indikatif disamakan dengan th. 2011, dikarenakan kegiatan bersifat pendampingan |
| | 13 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap | 2 | Tersedianya tenaga honorer/kontrak dan petugas lain | orang | 6 | 64,755,000.00 | 6 | 64,755,000.00 | 6 | 64,755,000.00 | | Kota Magelang | |

| NO | URUSAN / PROGRAM KERJA / KEGIATAN | PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA CAPAIAN | | PAGU INDIKATIF | | | | | | SUMBER DANA | LOKASI | KETERANGAN |
|----------|--|-----------|--------------------------------------|--------|----------------|-----------------------|------------|-------------------------|------------|-----------------------|-------------|---------------|---|
| | | | TOLOK UKUR | SATUAN | TAR1 | Tahun 2011 | TAR2 | Tahun 2012 | TAR3 | Tahun 2013 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 14 Pengelolaan administrasi kepegawaian | 2 | Laporan administrasi kepegawaian | File | 78 | 27,992,000.00 | 78 | 37,004,000.00 | 78 | 35,000,000.00 | | Kota Magelang | |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | | | % | 100 | 635,417,000.00 | 100 | 3,045,005,000.00 | 100 | 735,250,000.00 | | | |
| | 1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional | 2 | Kendaraan roda 2 dan 4 | unit | 1 | 172,425,000.00 | 1 | 366,325,000.00 | 1 | 0.00 | | Kota Magelang | Pengadaan Kendaraan roda 2 pd th. 2012 untuk peningkatan pemungutan PBB |
| | 2 Pengadaan peralatan gedung kantor | 2 | Peralatan kantot | unit | 6 | 71,600,000.00 | 6 | 2,234,000,000.00 | 6 | 150,000,000.00 | | Kota Magelang | Penambahan anggaran pd tahun 2012 sebesar Rp. 2 M untuk Software dan Hardware PBB dikarenakan pelimpahan kewenangan PBB dari Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah sesuai amanat UU No. 28 Tahun 2009 dan untuk cakupan WP-PBB secara menyeluruh |
| | 3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 2 | Gedung yang terpelihara | unit | 1 | 7,500,000.00 | 1 | 16,500,000.00 | 1 | 17,000,000.00 | | Kota Magelang | |
| | 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 2 | Kendaraan dinas yang terpelihara | unit | 55 | 230,642,000.00 | 55 | 306,250,000.00 | 55 | 306,250,000.00 | | Kota Magelang | |
| | 5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 2 | Perlengkapan Gedung yang terpelihara | unit | 10 | 5,000,000.00 | 10 | 5,000,000.00 | 10 | 6,000,000.00 | | Kota Magelang | |
| | 6 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | 2 | Jumlah meubel yang diperbaiki | set | 30 | 2,000,000.00 | 30 | 5,500,000.00 | 30 | 6,000,000.00 | | Kota Magelang | |

| NO | URUSAN / PROGRAM KERJA / KEGIATAN | PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA CAPAIAN | | PAGU INDIKATIF | | | | | | SUMBER DANA | LOKASI | KETERANGAN |
|-----------------------------|---|-----------|---|---------|----------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|-------------|---------------|--|
| | | | TOLOK UKUR | SATUAN | TAR1 | Tahun 2011 | TAR2 | Tahun 2012 | TAR3 | Tahun 2013 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor | 2 | Jumlah peralatan kantor yang dipelihara | unit | 116 | 146,250,000.00 | 116 | 111,430,000.00 | 116 | 250,000,000.00 | | Kota Magelang | Penambahan anggaran pada tahun 2013 untuk pemeliharaan hardware dan software PBB |
| 3 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 2 | | % | 100 | 224,421,000.00 | 100 | 352,818,000.00 | 100 | 329,000,000.00 | | | |
| | 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 2 | RKA/DPA, Laporan laporan Dinas | Jenis | 9 | 87,500,000.00 | 9 | 123,750,000.00 | 9 | 125,000,000.00 | | Kota Magelang | Penambahan anggaran dikarenakan dengan dibentuknya tim penyusun laporan |
| | 2 Penyusunan laporan keuangan semesteran | 2 | Laporan realiasi keuangan semesteran | bendel | 3 | 6,075,000.00 | 3 | 15,868,000.00 | 3 | 16,000,000.00 | | Kota Magelang | |
| | 3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | 2 | Buku Prognosis realisasi APBD | Buku | 88 | 46,596,000.00 | 88 | 73,829,000.00 | 88 | 74,000,000.00 | | Kota Magelang | |
| | 4 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD | 2 | Jumlah Laporan keuangan secara berkala | bendel | 12 | 37,854,000.00 | 12 | 55,986,000.00 | 12 | 56,000,000.00 | | Kota Magelang | |
| | 5 Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana | 2 | Jumlah SPJ yang di verifikasi | Dokumen | 1,500 | 46,396,000.00 | 1,500 | 83,385,000.00 | 1,500 | 58,000,000.00 | | Kota Magelang | Penambahan anggaran di th 2012 dari penggeseran kegiatan Jasa tenaga kontrak |
| TOTAL PAGU INDIKATIF | | | | | | 4,684,509,000.00 | | 9,310,397,000.00 | | 6,742,849,000.00 | | | |

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang tahun 2013 pada dasarnya merupakan perencanaan kegiatan selama 1 tahun kedepan serta evaluasi kegiatan tahun sebelumnya, dimana dalam penyusunannya mengacu pada Renstra DPPKD Kota Magelang Tahun 2011 – 2015.

Disamping mengacu pada RPJMD, juga sudah disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan serta Visi, Misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan yang terdapat pada Renstra DPPKD serta bertujuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kota Magelang yang tertuang dalam RPJMD Kota Magelang. Disamping hal tersebut, Renja juga sebagai dasar dalam penyusunan anggaran pada masing-masing kegiatan dilingkup DPPKD Kota Magelang.

Dengan adanya Rencana Kerja DPPKD Kota Magelang Tahun 2013 diharapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2013 dapat mensinergikan dengan program dan kegiatan SKPD yang lain disamping Renja DPPKD Kota Magelang juga merupakan pengendali kegiatan pada masing-masing Sub Bagian / Seksi dan Bidang di lingkup DPPKD Kota Magelang.